

Validasi Terhadap Keaslian Surat Keterangan

Validasi Terhadap Keaslian Surat Keterangan

Scan Barcode (QR Code)

eraterang Validitas Layanan Elektronik

Nomor Register : 55/SK/HK/06/2019/PN Mad
Pengadilan Negeri Madiun

Status: **Salah**

Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
Untuk Tujuan: Pencakmakan Sebagai Kepala Desa

Identitas Pemohon

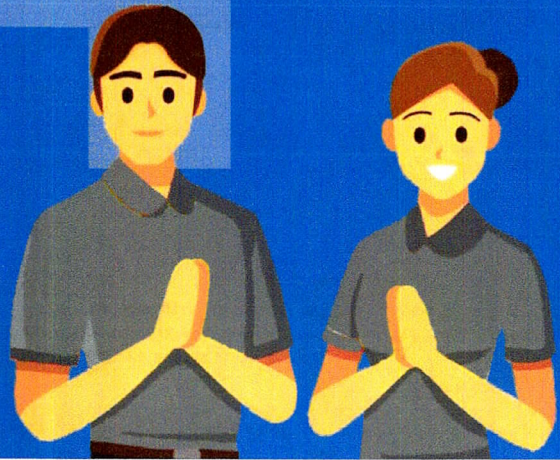
Nama Lengkap	DUDON ANGGA WYTONO
Kartu Identitas	Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Nomor Identitas	1234567890
Jenis Kelamin	Pria
Alamat Identitas	Pemukiman Candra Kirana Blok W-4 badi
Kabupaten	

© Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia

TATA CARA PENDAFTARAN AKUN ERATERANG

- Mengakses melalui laman website <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/>
- Melakukan pendaftaran akun dengan klik "Daftar dengan Google" atau "Daftar dengan email"
- Mengisi data diri yang diminta
 - Nama Lengkap
 - Alamat email
 - Kata sandi
- Buka email dan klik aktivasi user
- Akun yang terverifikasi sudah dapat digunakan untuk mendaftarkan surat keterangan

Bantu Kami Membangun Zona Integritas dengan **Tidak** Memberi Imbalan atau Gratifikasi



ERA BARU SURAT KETERANGAN

<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/>

- 1 Layanan**
Jangkauan Layanan yang lebih luas
- 2 Validitas**
Validasi terhadap pihak-pihak berperkara di Pengadilan
- 3 Kecepatan**
Kecepatan dalam pelayanan publik dengan bantuan Teknologi Informasi yang tepat

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

Jalan Raya Koto Baru No. 62 Kabupaten Solok
Telp. (0755) 20320 - 20121
Email : pn.kotobaru@pn-kotobaru.go.id
Website : www.pn-kotobaru.go.id

Email : pn.kotobaru@pn-kotobaru.go.id

Fax. (0755) 20320

Website : www.pn-kotobaru.go.id

Eraterang

Elektronik Surat Keterangan

Merupakan layanan permohonan Surat Keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun berada, selama tersedianya jaringan internet dan Ponsel Pintar (smart phone)/Komputer.

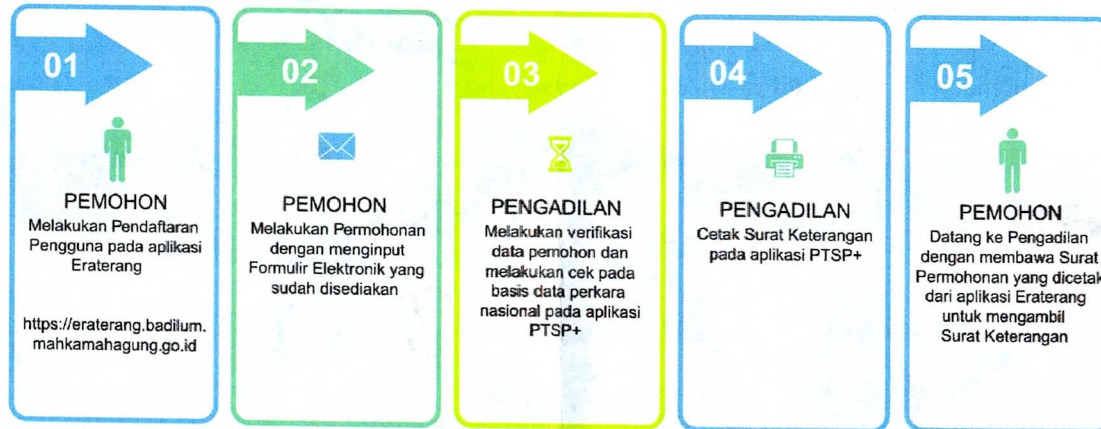
JENIS SURAT KETERANGAN

- Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
- Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik
- Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara

PERSYARATAN

- Surat Permohonan Surat Keterangan;
- Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara diatas Materai Rp.6.000,- (1 Lembar);
- Surat Pernyataan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya diatas Materai Rp.6.000,- (1 Lembar);
- Fotocopy KTP (1 Lembar);
- Pas Foto Berwarna 4x6 (1 Lembar);
- Fotocopy SKCK Legalisir (1 Lembar).
- Membayar Leges / PNBP Rp.10.000,-

Tahapan Permohonan



TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/III/2019

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF (RUPIAH)	SATUAN
HAK KEPANITERAAN LAINNYA		
a. Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	10.000	per surat
b. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan	500	per lembar
c. Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan	10.000	per berita acara
d. Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan	10.000	per surat
e. Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	10.000	per akta/surat
f. Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan	10.000	per surat kuasa/kuasa insidentil
g. Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	10.000	per putusan/penetapan
h. Sisa Uang Panjar Biaya Perkara (yang tidak diambil dalam waktu 6 bulan)		per perkara

PENGADUAN :

Laporkan Pengaduan Ke siwas.mahkamahagung.go.id
 Sampaikan Juga Laporan Pengaduan ke Meja Pengaduan atau Sampaikan Laporan Pengaduan Melalui :
 Telp. (0755) 20320 - 20121 atau
 Email : pn.kotobaru@pn-kotobaru.go.id



Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016
 Tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi
 Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019
 Tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
 Terhadap Surat Keterangan Di Luar Perkara



Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2018
 Tentang Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
 Nomor 3 Tahun 2016



SK Dirjen Badilum Nomor 44/DJU/SK/HM023/2/2019
 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) Di Lingkungan Peradilan Umum